

PERAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PEMBINAAN PEMUDA DI DESA BRAJA ASRI SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN KEADABAN KEWARGANEGARAAN (*CIVIC VIRTUE*)

Yulianti Puspita Dewi, Berchah Pitoewas, Muhammad Mona Adha

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung, Bandar Lampung
puspita Dewi025@gmail.com; pitoewasberchah@gmail.com; mohammad.monaadha@fkip.unila.ac.id

Abstract

The village government as a stakeholder who is responsible for developing the potential that exists in the village, one of which is the potential of human resources. Youth is an important component in the village as a partner of the village government to work together to advance the welfare of the village. Based on the Republican Theory of Citizenship that individual freedom exists in a guarantee of state security that is under the legal order and the virtues of citizens (civic virtues) to be able to participate in it. The purpose of this study is to analyze and describe the role of the village government in carrying out youth development efforts in Braja Asri Village as an effort to establish civic virtue. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out by means of observation, documentation, and interviews. Based on the results of the study, it shows that the implementation of guidance from the Braja Asri Village government has not been effective because the village government is still focusing on the physical development of the village, the lack of motivation from the youth themselves, the personal busyness of each young man. This affects the process of forming civic virtue in the youth because there needs to be good cooperation between fellow components, namely the village government and the youth.

Keywords: *Village Government, Youth Development, Citizenship Civilization*

Abstrak

Pemerintah desa sebagai *stakeholders* yang bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi yang ada di desa salah satunya potensi sumber daya manusia. Pemuda menjadi komponen penting di desa sebagai mitra dari pemerintah desa untuk saling bekerja sama memajukan kesejahteraan desa. Berdasarkan Teori Kewarganegaraan Republikan bahwa kebebasan individu ada dalam suatu jaminan keamanan negara yang berada di bawah tatanan hukum dan kebajikan warga negara (*civic virtues*) untuk dapat berpartisipasi di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peranan pemerintah desa dalam melakukan upaya pembinaan pemuda di Desa Braja Asri sebagai upaya pembentukan keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dari pemerintah Desa Braja Asri belum berjalan efektif dikarenakan pemerintah desa masih berfokus pada pembangunan fisik desa, kurangnya motivasi dari pemuda itu sendiri, kesibukan pribadi dari setiap pemuda. Hal tersebut berpengaruh pada proses pembentukan keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*) pada diri pemuda karena perlu ada kerja sama yang baik antara sesama komponen yakni pemerintah desa dengan pemuda.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Pembinaan Pemuda, Keadaban Kewarganegaraan

A. Pendahuluan

Peran dari aparaturnya pemerintah desa sangat penting di suatu wilayah karena mereka merupakan *stakeholders* sebagai penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta melakukan pembinaan pemuda di desa. Upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih demokratis, pemuda menjadi perhatian utama dikarenakan pemuda merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam melakukan perubahan untuk memajukan suatu bangsa. Maka dari itu, pembinaan perlu untuk dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan suasana kepemudaan yang sehat serta tanggap terhadap pembangunan masa depan yang akan meningkatkan kualitas pemuda yang berdaya guna di tengah dinamika zaman yang pesat (Pratamadan Rahmat, 2018: 171).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 1 Ayat (5) disebutkan bahwa perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Aparatur dapat diartikan sebagai pegawai negeri atau seperangkat sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola kekuasaannya meliputi kepala desa, sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Dalam pembinaan, proses lebih ditekankan bukan semata-mata pada hasil. Oleh karena itu, indikator keberhasilan pembinaan adalah

seberapa besar partisipasi dari individu atau masyarakat. Maka dari itu, membentuk pemuda yang peduli dan memiliki empati serta wawasan yang luas terhadap lingkungan sekitar sangat dibutuhkan, salah satunya melalui upaya pembinaan semua pihak secara kohesi. Menurut Adha (2021: 571), dijelaskan bahwa keadaban kewarganegaraan merupakan kesadaran setiap individu untuk mampu menentukan langkah yang lebih baik dan bermanfaat sehingga menjadi seseorang dengan kepribadian yang tidak hanya berpikir akan diri sendiri namun memberikan aspek manfaat untuk lingkungan di luar individu itu sendiri serta memposisikan kepentingan pribadinya sesuai dengan tempatnya untuk melaksanakan kepentingan yang berguna bagi khalayak.

Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya perlu untuk bekerja sama dalam membantu generasi muda guna mengembangkan potensinya serta membantu mewujudkan kesadaran dan tanggung jawab generasi muda terhadap permasalahan sosial baik yang bersifat preventif maupun rehabilitatif. Mangunhardjana (Anggara, 2020) mengungkapkan untuk melakukan pembinaan ada beberapa yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

- a. Pembinaan Pengetahuan
Pembinaan ini menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada sasaran, misalnya dengan sosialisasi.
- b. Pembinaan Pengembangan Sikap
Dalam pembinaan karakter berupaya menjadikan seseorang sadar akan tanggung jawab diri yang berhubungan dengan karakter warga negara yang baik (*good citizen*). Dengan dilakukannya pembinaan maka diharapkan terciptanya tindakan-tindakan yang kurang baik dapat dicegah, sehingga pemuda dapat terhindar

dari masalah-masalah yang dapat menghambat perkembangan.

c. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan ini menjadikan seseorang sadar akan peran dirinya dalam kehidupannya yang memiliki wawasan, pandangan, dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungan.

Menurut United Nations (1956, h.83-92 dalam Ulumiyah, dkk. 2013: 894) tujuan utama dilakukannya pembinaan adalah membangun rasa percaya diri para pemuda dan rasa percaya diri merupakan modal utama untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut maka tujuan dari pemerintah desa melakukan pembinaan khususnya pada warga negara muda yaitu agar mereka bisa menjadi mandiri dan mampu menyokong dirinya agar tidak terjatuh ke dalam posisi negatif. Partisipasi pemuda di masyarakat sangat diperlukan guna membangun kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik. Mereka dapat berperan serta dalam suatu usaha bersama dengan masyarakat untuk kepentingan bersama. Sesuai dengan pendapat dari Lawry (2006) bahwa pemuda harus memiliki rasa tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya mementingkan kepentingan pribadi (Adha, 2015).

Memiliki kesadaran dalam diri akan kepentingan umum yang perlu untuk diperhatikan daripada kepentingan pribadinya atau golongan saja. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Ketika para pemuda mempunyai kesadaran dan komitmen akan kepentingan serta permasalahan umum menjadi bagian dari tanggung jawab mereka maka itu menandakan bahwa para pemuda memiliki *civic virtue*

(keadaban kewarganegaraan) yang baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai *civic virtue*, bahwa *civic virtue* berkembang dengan baik di masyarakat Desa Balun yang tercermin dari kepedulian terhadap masyarakat lain di sekitarnya, toleransi terhadap keberagaman sangat tinggi, warga yang beragama minoritas memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan dan partisipasi politik misalnya ketika melaksanakan pemilu, serta keterlibatan masyarakat secara langsung dalam berbagai macam kegiatan seperti kegiatan keagamaan (Hidayati dan Harmanto, 2017: 106).

Konsep *civic virtue* dijelaskan juga oleh Quigley dalam Wianto (2010: 11) adalah “...the willingness of citizen to set aside private interests and personal concerns for the sake of the common good”, yang dapat dimaknai sebagai kemauan dari warga negara untuk bisa menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Berdasarkan penjelasan Quigley dalam Susanti (2011: 4), *civic virtue* memiliki dua unsur yakni :

- a. *Civic Disposition*, yakni karakter atau sikap warga negara yang mendorong berkembangnya fungsisosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. *Civic disposition* meliputi karakteristik kepribadian seperti tanggung jawab individu, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran, toleransi terhadap adanya keragaman, kesabaran dan keajekan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya untuk pemeliharaan dan perbaikan pemerintahan sertakewarganegaraan yang demokratis.
- b. *Civic Commitment*, yakni komitmen warga negara yang menerima dengan sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional. Kesiediaan warga negara untuk bisa

menghormati hak-hak minoritas, kontrol dan penyeimbangan, persamaan kebaikan umum (dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi), prinsip negara hukum, hak kebebasan, keadilan, dan cintatana air.

Keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*) mengandung nilai pengorbanan sehingga setiap warga negara mengabdikan untuk kesejahteraan bersama dengan mengorbankan kepentingan pribadi. Berdasarkan Teori Kewarganegaraan Republikan bahwa warga negara dapat berpartisipasi di sebuah negara apabila terdapat kebebasan individual di bawah aturan dan kebajikan warga negara (*civic virtue*), sehingga terjalin komitmen untuk kebaikan bersama dan partisipasi aktif dalam urusan-urusan publik (Dagger, dalam Effendi, 2018: 59). Menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih demokratis merupakan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan, maka dari itu upaya pemerintah desa dan perangkatnya sebagai fasilitator dan motivator untuk membina serta mendukung kegiatan kepemudaan adalah hal yang penting. Hal tersebut guna menciptakan pemuda yang adaptif dan tidak apatis terhadap lingkungannya sesuai dengan tujuan pembentukan kewarganegaraan yang memiliki kebajikan.

Adanya pergeseran perilaku pemuda Indonesia tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi komunikasi yang menyebabkan tumbuh berkembang dan menyebarkan sifat individualisme. Hanya sedikit pemuda yang dapat berkontribusi dalam peranannya sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, juga dengan hakikat mereka sebagai makhluk sosial yang menekankan pada tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan (Suseno, 2015). Hal tersebut juga terjadi di Desa Braja Asri, berdasarkan hasil wawancara ditinjau

dari segi peranan aparat pemerintah desa yakni tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan kepada para pemuda belum optimal karena aparat pemerintah belum menjalin kerja sama dan koordinasi yang baik terhadap pemuda sehingga pemuda tidak tergerak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Selain itu, keterlibatan pemuda dalam organisasi kepemudaan sebagai wadah pembinaan tergolong rendah, pemuda cenderung hanya aktif dalam kegiatan olah raga sosial kemasyarakatan seperti gotong royong membersihkan jalan, masjid, dan lingkungan sekitar.

Tantangan yang dihadapi oleh aparat desa yang sesuai dengan kondisi para pemuda sangat tergantung pada upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat yang saat ini masih kurang. Padahal pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan menjadi pendorong untuk mengembangkan tanggung jawab serta partisipasi pemuda dalam setiap pelibatan di masyarakat dalam rangka membentuk pemuda yang memiliki nilai-nilai keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*) di tengah masyarakat multikultural. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian berkenaan dengan judul “Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam Pembinaan Pemuda di Desa Braja Asri sebagai Upaya Pembentukan Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)”. Dalam hal ini aparat desa menjadi aktor yang memiliki tanggung jawab besar untuk saling bekerja sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa yang dipimpinnya.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Al-Muchtar

(2016), pendekatan kualitatif digunakan untuk melihat lebih dalam dan mengamati sebuah kasus dari masalah sosial atau fenomena sosial yang digambarkan dengan kata-kata dan penjabaran untuk mengungkap makna dari suatu kejadian. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yakni dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.

C. Pembahasan dan Hasil

1. Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Pemerintah Desa Braja Asri

Partisipasi pemuda Desa Braja Asri dalam program di desa adalah keterlibatan pemuda serta tanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Ericson dalam Angkasawati (2013: 21), bentuk partisipasi pemuda dalam program pemerintah desa terbagi atas tiga tahap, yaitu:

a. Tahap Perencanaan

Pada tahapan perencanaan, pemuda mulai dari ketua organisasi kepemudaan misalnya Karang Taruna Braja Asri, BKPRMI, dan RISMA dilibatkan mulai dari proses musyawarah di tingkat dusun terlebih dahulu bersama perwakilan tokoh masyarakat lainnya. Pada tahapan ini, pemuda sudah menunjukkan bentuk keikutsertaan mereka melalui penyusunan rencana dan strategi misalnya program-program apa saja yang ingin diadakan, penyusunan kepanitiaan pada suatu kegiatan. Pemuda memberikan usulan, saran, kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini yang dimaksudkan adalah keterlibatan pemuda pada tahap pelaksanaan suatu kegiatan. Karang Taruna atau organisasi kepemudaan lainnya di sini dapat memberikan tenaga serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada kegiatan tersebut. Misalnya saja pada perlombaan antar dusun di bidang olah raga di mana pemuda menjadi anggotakepanitiaan dan terlibat ikut serta dalam perlombaan. Tidakhanya pada kegiatan perlombaan antar dusun saja, pemuda juga dilibatkan pada kegiatan donor darah, hari ulang tahun desa, pesta rakyat, serta kegiatan-kegiatan pembinaan yang diadakan oleh organisasi kepemudaan itu sendiri misalnya pelatihan kepemimpinan, sosialisasi bahaya narkoba dari BNN.

c. Tahap Pemanfaatan (Evaluasi)

Partisipasi dalam evaluasi atau pemanfaatan yang dimaksudkan yakni keterlibatan pemuda pada tahap pemanfaatan suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut selesai dilakukan. Partisipasi pemuda pada tahap ini berupa tenaga untuk mengoperasikan dan memelihara program yang telah dibangun. Selain itu juga, pada tahapan ini pemuda diajak untuk mengevaluasi setelah kegiatan diadakan. Namun pemuda Desa Braja Asri cenderung pasif pada tahap evaluasi kegiatan, dimana pemuda merasa adayang lebih tepat dalam hal mengevaluasi atau menilai dan menimbang suatu kinerja pemerintah desa.

Dalam pelaksanaannya, pasti akan ditemui suatu kendala atau penghambat untuk mengetahui partisipasi pemuda. Ada beberapa kendala yang ditemukan pada saat melakukan pengumpulan data yakni mulai dari pemuda yang kurang memiliki kesadaran dan pengetahuan mengenai pentingnya berorganisasi, pemuda melanjutkan studi di luar kota, kesibukan pribadi seperti bekerja dan mengurus urusan rumah tangga bagi yang sudah menikah. Selain itu juga kurangnya motivasi dan pembinaan dari pemerintah desa untuk melakukan kegiatan kepemudaan.

2. Peran Aparatur Desa dalam Upaya Pembinaan Pemuda

Peran dari pemerintah Desa Braja Asri dalam melakukan upaya pembinaan dilakukan dengan berbagai pendekatan. Dalam hal ini penulis melihat upaya pembinaan dari pemerintah desa dari pembinaan pengetahuan, pembinaan sikap, dan pembinaan keterampilan. Pembinaan pengetahuan dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada pemuda. Upaya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah desa bertujuan menjalin komunikasi dengan para pemuda agar dapat lebih kompak. Pemerintah desa terutama kepala desa mengajak para pemuda untuk berkumpul dan bermusyawarah guna membahas permasalahan di desa. Pembinaan yang dilakukan pemerintah Desa Braja Asri dalam pembinaan sikap dan keterampilan masih kurang. Pembinaan karakter merupakan ide dari organisasi kepemudaan

misalnya dari RISMA untuk melakukan pelatihan kepemimpinan, peran pemerintah desa hanya sekedar memberikan dukungan saja baik dukungan dana maupun moral. Pembinaan keterampilan dari pemerintah desa berfokus pada pembinaan keterampilan ketenagakerjaan guna mempersiapkan pemuda yang siap bekerja. Misalnya dengan bekerja sama dengan ketua Karang Taruna Desa Braja Asri untuk mengajak anggotanya belajar usaha ternak sapi, kambing, dan kayu. Selain pembinaan keterampilan ketenagakerjaan, pemerintah desa memberikan dukungan untuk para pemuda dalam keterampilan di bidang kesenian seperti seni teater.

3. Upaya Pembentukan Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*) pada Pemuda

Upaya pembentukan keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*) yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui pembinaan memiliki peranan penting. Pemerintah Desa Braja Asri sudah berupaya selalu mengajak dan melibatkan pemuda dalam penyelenggaraan kegiatan di desa. Hal tersebut untuk membentuk pemuda yang partisipatif dan memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Indikator yang menjadi acuan dalam penelitian penulis yakni pemuda yang bertanggung jawab, memiliki kepedulian kepada masyarakat, pemuda yang berpikir kritis, memiliki wawasan kebangsaan, dan pemuda yang partisipatif. Dalam hal ini, pemerintah Desa Braja Asri sudah berupaya melakukan pembinaan. Dari

pembinaan yang sudah dilaksanakan bertujuan untuk memberdayakan potensi pemuda.

Pemuda Desa Braja Asri sudah memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah desa. Dibuktikan dengan pemuda yang mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan desa, melalui organisasi-organisasi kepemudaan seperti karang taruna, BKPRMI, dan RISMA. Melalui organisasi tersebut, pemuda difasilitasi dan diberikan wadah agar dapat lebih terkontrol. Pemuda di era Revolusi Industri 4.0. dimana pemuda memiliki peranan yang sangat penting dalam hal memberikan akses informasi ke masyarakat. Pemuda menjadi mitra pemerintah dalam memberikan informasi ke masyarakat misalnya program dari pemerintah Desa Braja Asri.

Berpikir kritis terhadap lingkungan misalnya para pemuda Desa Braja Asri mengumpulkan dana untuk membantu masyarakat yang kurang secara finansial dan akan melakukan operasi. Bila dilihat aspek tersebut pemuda sudah

memiliki tanggung jawab sosial dan membangun sisikemanusiaan dalam dirinya. Aspek keadaban lainnya yaitu pemuda yang memiliki wawasan kebangsaan dimana menurut informan pemuda yang memiliki wawasan kebangsaan adalah disaat pemuda memiliki rasatanggung jawab untuk terlibat dalam masyarakat. Secara tidak langsung pemuda sudah menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Indikator yang terakhir yakni pemuda yang partisipatif dimana ini ditunjukkan dengan pemuda yang terlibat dalam kegiatan musrenbang desa dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi.

Peran Pemerintah Desa dalam Pembinaan Pemuda sebagai Upaya Pembentukan Keadaban Kewarganegaraan (Civic Virtue)

Hubungan antar pemuda dengan pemerintah desa di dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya berhubungan erat dengan kekuasaan yang diperintah. Namun dalam hal ini, pemerintah Desa Braja Asri berupaya untuk menjadikan para pemuda sebagai mitra dalam menjalankan penyelenggaraan di desa. Kedua komponen tersebut harus bisa bekerja sama dan menjalinkomunikasi yang baik agar

memperlancar pencapaian tujuan dari desa.

Dengan dilakukan upaya pembinaan, pemuda diarahkan dan difasilitasi oleh pemerintah desa agar melakukan kegiatan yang positif demi kesejahteraan bersama. Ketika pemerintah desa dianggap kurang memfasilitasi kegiatan pemuda, maka pemuda bisa merasa malas untuk mengadakan kegiatan lagi, tentu ini akan memengaruhi tingkat keberhasilan pembentukan keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*). Menurut Adha (2019: 18), pengembangan dimensi keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*) merupakan landasan bagi pengembangan partisipasi warga negara yang merupakan tujuan utama sebagai warga negara yang baik dan cerdas. Hal tersebut sejalan dengan konsep kewarganegaraan Republikan dimana di dalam kehidupan bernegara, hak-hak individu dijamin oleh negara dengan syarat individu tersebut harus memiliki kebajikan warga negara (*civic virtue*) dan dapat berperan di dalam negara tersebut (Effendi, 2018: 61). Menurut Quigley dalam Susanti (2011: 4), *civic virtue* merupakan ranah psikososial yang terdiri dari dua unsur yaitu watak kewarganegaraan (*civic disposition*) dan komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*).

Fokus utama *civic virtue* yakni individu mampu menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi (Adha, 2021). Di Desa Braja Asri, pemuda sudah memiliki konsep dasar pemahaman mengenai pentingnya partisipasi di kehidupan bermasyarakat, namun masih perlu dibina dan dilakukan pembiasaan. Berdasarkan konsep Aristotelian bahwa partisipasi warga negara perlu disadari kewarganegaraan sejatinya bukan pemahaman dalil yang abstrak melainkan suatu bentuk kebijakan praktis yang bisa diikuti oleh seluruh warga negara. Dengan kata lain, pembentukan keadaban kewarganegaraan tidak cukup hanya disampaikan dalam seminar atau sosialisasi yang membosankan, tetapi perlu dibumikan dalam tindakan konkret. Demi tujuan ini, kewarganegaraan membutuhkan habituasi atau pembiasaan.

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa akan berjalan efektif apabila pemerintah desa dan pemuda saling menjalin komunikasi yang baik. Apakah dalam perencanaan sampai pelaksanaan sudah sesuai kebutuhan pemuda itu sendiri. Pembentukan keadaban kewarganegaraan tidak serta merta terbentuk namun melalui proses yang panjang dan melalui pembiasaan terus menerus. Oleh karena itu, pemerintah desa terutama yang sesuai dengan bidangnya harus mengenal pemuda dan lebih memperhatikan agar lebih mudah untuk mengkomunikasikan. Pemuda juga harus lebih tanggap dan peka terhadap tanggung jawabnya di desa.

D. Simpulan

Peran aparatur Desa Braja Asri dalam pembinaan kepemudaan dapat disimpulkan bahwa aparatur Desa Braja Asri sudah melakukan upaya pembinaan kepemudaan baik melalui organisasi kepemudaannya, organisasi keagamaan, dan kegiatan-kegiatan sosial. Walaupun dalam pelaksanaannya masih kurang dalam pembinaan sikap dan keterampilan. Maka perlu ada perbaikan dan upaya peningkatan agar sumber daya manusia terutama pemuda sebagai komponen penting untuk dikembangkan lebih maksimal. Partisipasi pemuda dalam kegiatan pemerintahan di Desa Braja Asri sudah cukup baik dapat dibuktikan dari dilibatkannya pemuda dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi/ pemanfaatan. Namun dalam prosesnya tentu ada kendala yang dihadapi baik dari pemuda, maupun aparatur desa. Meskipun demikian, pemerintah desa terus berupaya untuk melakukan pembinaan dan menjalin komunikasi yang baik dengan pemuda untuk memotivasi dan membentuk kesadaran diri pemuda untuk terjun langsung dalam melakukan kegiatan kepemudaan. Upaya pembentukan keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*) pemuda yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui pembinaan memiliki peranan penting. Ketika pemuda sudah memiliki nilai-nilai keadaban dalam dirinya maka akan memengaruhi tingkat partisipasi dan peran serta pemuda dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Adha, M.M. 2015. *Memformulasikan dan Mengimplementasikan Civic Engagement*

- pada Perguruan Tinggi untuk Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Indonesia.* (Seminar Nasional). Universitas Negeri Malang. Malang.
- Adha, M.M. 2019. *Pengembangan Keadaban Kewarganegaraan Melalui Festival Krakatau.* (Tesis). Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Adha, M.M., et. all. 2021. *Implementasi Nilai Civic Virtue dalam Pelestarian Budaya Lokal Bagi Pemuda Indonesia dalam Konteks Era Society 5.0.* (Seminar Nasional). (Universitas Sebelas Maret). Surakarta.
- Adha, M.M., et. all. 2021. *Penguatan Civic Virtue pada Pembelajaran PPKn dalam Rangka Menghadapi Era Society 5.0.* (Universitas Sebelas Maret). Surakarta.
- Al-Muchtar, S. 2016. *Dasar Penelitian Kualitatif.* Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Anggara, S.Y. 2020. *Pembinaan Moral di Lingkungan Pendidikan Pondok Pesantren Melalui Syariat Islam dalam Mengatasi Kenakalan Remaja.* (Skripsi). Universitas Pasundan. Bandung.
- Angkasawati. 2013. *Partisipasi Pemuda dalam Karang Taruna Desa (Studi di Desa Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung).*
- Effendi, W.R. 2018. *Konsepsi Kewarganegaraan dalam Perspektif Tradisi Liberal dan Republikan.* *Jurnal Trias Politika*, 2 (1), 55-62.
- Hidayati, N. dan Harmanto. 2017. *Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Civic Virtue di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan .* *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 5 (1), 106-120.
- Pratama, F.F. dan Rahmat. 2018. *Peran Karang Taruna dalam Mewujudkan Tanggung Jawab Sosial Pemuda sebagai Gerakan Warga Negara.* *Jurnal Civics*, 15(2), 170-179.
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.* Sekretariat Negara: Jakarta.
- Susanti, H.D. 2011. *Pembelajaran Demokrasi dalam Pembentukan Civic Virtue Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 10 Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010.* (Skripsi). Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Suseno, F.M. 2015. *Etika Politik. Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ulumiyah, I., Abdul, J.A.G., dan Lely, I.M., 2013. *Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.* *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (5), 890-899.